

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil uraian peneliti berupa wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dan komunitas penelitian, serta pembahasan mengenai masalah yang dikaitkan dengan teori Implementasi Van Meter vanHorn maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan dengan baik namun belum efektif. Berikut penjelasannya:

1. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan akses jamban sehat masyarakat dan mengurangi kejadian penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air oleh limbah manusia. Dan dalam pelaksanaannya tujuan tersebut dapat dicapai walaupun belum 100% ODF
2. Implementor program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 dan dijabarkan dengan jelas masing-masing implementor yang terlibat. Implementor tersebut adalah Tim Kerja STBM. Namun dalam pelaksanaan Tim Kerja STBM tidak dibentuk dan tidak memiliki SK dalam pelaksanaan program, sehingga implementor yang seharusnya ikut dalam pemecuan tidak

mengetahui tupoksi mereka. Implementor yang bekerja untuk melakukan pemecuan masih sama seperti pertama kali program dijalankan.

3. Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Keberadaan Tim Kerja STBM yang tidak jelas ternyata tidak mempengaruhi kinerja program. Karena pada dasarnya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sudah dilaksanakan jauh sebelum Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2017 dikeluarkan sehingga implemntor yang telah biasa melaksanakan pemecuan tidak mengalami kesulitan saat dilapangan walaupun tidak memiliki Tim Kerja STBM yang sesuai dengan PERBUP.
4. Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sumber pendanaan sosialisasi Dinas Kesehatan kepada puskesmas berasal dari APBD dan sumber pendanaan pemecuan oleh Puskesmas kepada masyarakat bersumber dari BOK.
5. Komunikasi dan koordinasi antara implementor berjalan dengan baik.
6. Dukungan dari masyarakat sangat baik terhadap program dan kegiatan pemecuan, terlihat dari antusias masyarakat dalam ikut pemecuan, namun tidak adanya bantuan dana khusus bagi masyarakat yang kurang mampu membuat akses jamban sehat sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki akses jamban sendiri dirumah menjadi tidak terealisasikan.
7. Faktor kondisi lingkungan sosial masyarakat termasuk menajdi faktor penting keberhasilan program.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan menurut Van Meter dan Van Horn di BAB V, dapat disimpulkan bahwa implementasi

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Pilar 1 yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Lima Puluh Kota telah terlaksana dengan baik dan akses jamban masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari tahun ketahun.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis data yang peneliti paparkan pada BAB V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada pemerintah Kabupaten Lima Puluh dan implementor program Sanitasi total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

1. Dibentuknya TIM kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Surat keterangan (SK) sehingga para implementor mengetahui tupoksi mereka masing-masing dalam pelaksanaan program.
2. Inovasikan kegiatan pemicuan karena kegiatan pemicuan yang dilakukan oleh puskesmas lebih kepada bentuk sosialisasi saja. Bukan pemicuan seperti yang seharusnya.
3. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan sosialisasi yang lebih kepada implementor program Sanitasi total Berbasis masyarakat terhadap Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2017 agar dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh implementor.
4. Komunikasi dan koordinasi antar implementor lebih di tingkatkan agar pelaksanaan program dapat dibangun lebih baik dan di ketahui oleh setiap

implementor yang terlibat dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menjalankan keseluruhan pilar STBM yang ada. tidak hanya berfokus kepada pilar satu saja.

